

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

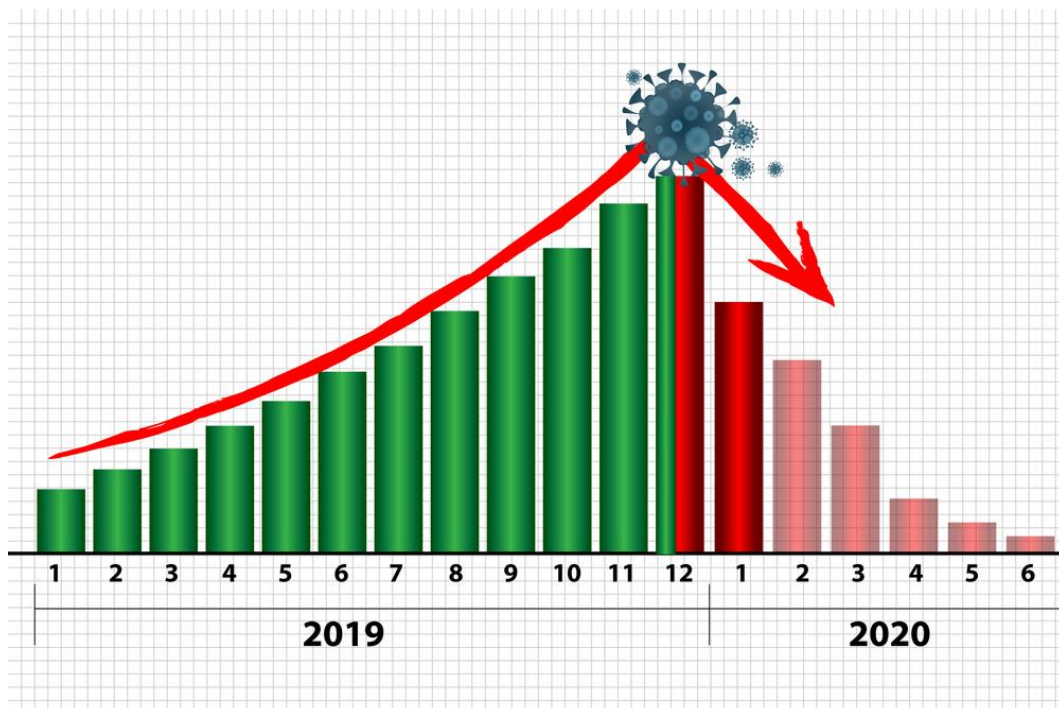
Usaha dalam bentuk yang memiliki badan hukum maupun tidak merupakan komponen pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi dengan berbagai macam usaha pada akhirnya akan memberikan sumbangan pendapatan secara nasional dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Usaha dalam lingkup mikro, kecil maupun menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dapat menggerakkan perekonomian secara makro dengan bermuara pada perubahan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha-pengusaha yang tergolong dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan perhatian khusus agar mampu mengelola dengan baik usahanya dari segi permodalan. Pengelolaan usaha yang baik dapat dilihat dari tata kelola keuangan, serta perilaku dalam mempertahankan usahanya dengan keteguhan hati, selain itu juga harus adanya pembukuan yang baik dengan pengendalian internal yang terukur agar tidak terjadi kecurangan (Afkar, 2017).

Financial Behaviour yaitu mempelajari bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (*a financial setting*). Khususnya, mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan pasar keuangan.

Perilaku manajemen keuangan mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengatur dana keuangan. Kemampuan mengatur dana keuangan meliputi: membuat perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Perilaku manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang mengenai cara pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif. Kesadaran perencanaan berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Oleh karena itu jika seseorang tidak menganggap penting perencanaan keuangan akan berdampak negatif terhadap perilaku manajemen keuangan, misalnya dengan tidak membuat anggaran. Perilaku manajemen keuangan berpengaruh positif jika seseorang dapat menyusun berbagai proyeksi atau kebutuhan uang kas dimasa yang akan datang dan mengontrol biaya untuk meningkatkan produktivitas dan

memberikan dukungan terhadap proses produksi (Humaira dan Sagoro, 2018). Pengetahuan keuangan mengacu pada apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tingkat pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui jalur program sekolah tinggi perguruan tinggi, ataupun melalui kelas pelatihan.

Dilansir melalui IFC (2016) Perekonomian Indonesia termasuk negara yang Memiliki kepadatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tertinggi di Dunia Melalui kegiatan survey pada 132 negara yang telah dilaksanakan oleh *International Financial Corporation* (IFC). Bagi negara Indonesia, UMKM menjadi panutan utama Perekonomian. Dari segi pengadaan pekerjaan, dari seluruh tenaga kerja yang Bekerja di sector usaha, UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran sector UMKM lain (Kusumaningtuti & Setiawan, 2018). Sehingga bagi pelaku UMKM, penting untuk Memahami literasi dan inklusi keuangan serta penguasaan teknologi keuangan agar Dapat memberdayakan UMKM mengenai sumber pendanaan dan kemampuan Keterampilan yang akan membantu keberlangsungan UMKM untuk menentukan Keputusan mereka dalam mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur Keuangannya dan juga membantu UMKM terhindar dari indikasi penipuan (OECD, 2017). Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan literasi maupun inklusi keuangan di Indonesia, dengan dikembangkannya UMKM diyakini dapat membantu OJK Karena UMKM mampu memahami pemahaman dasar mengenai produk dan Layanan keuangan sehingga dalam menentukan keputusan melalui perencanaan dan Pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan juga membantu pelaku UMKM agar Terhindar dari penipuan dan pasar keuangan yang tidak sehat. Kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pengelolaan sumber daya Keuangan semakin meningkat, dan akan berat untuk mewujudkan impian Kemakmuran di masa depan apabila tidak dibekali pengetahuan dibidang keuangan (Kusumaningtuti & Setiawan, 2018).



Gambar 1.1

Grafik pendapatan umkm pada tahun 2019-2020

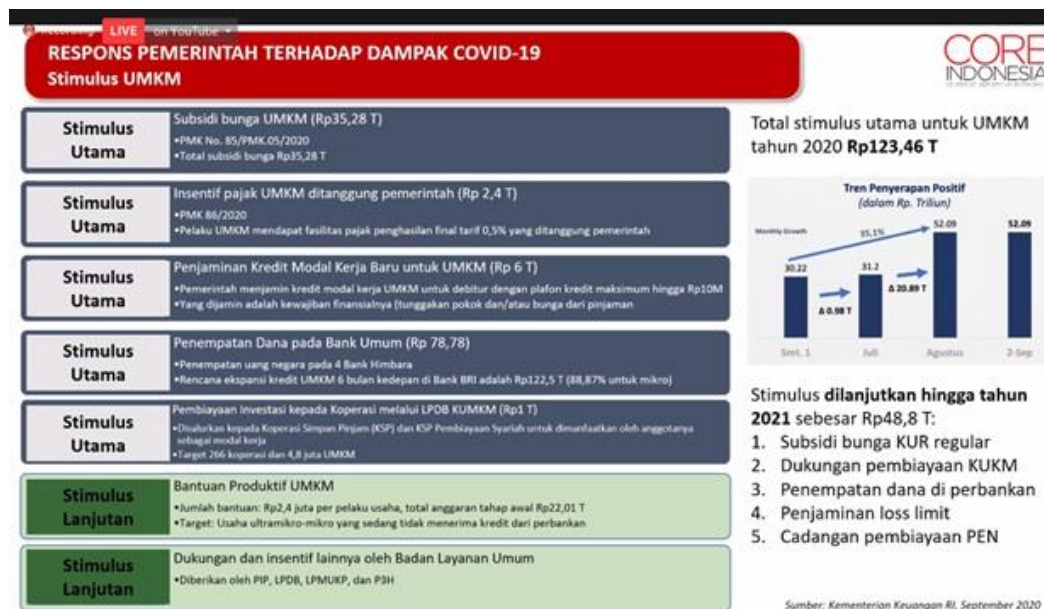
(Sumber www.okezone.com)

Berdasarkan gambar tersebut pendapatan para pelaku UMKM di Indonesia terus menurun dimulai dari awalnya pandemi pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 yang pada akhirnya membuat para pelaku umkm mengalami pemasukan yang kurang dari usahanya dan juga membuat mereka menutup usahanya, maka di tahun tahun berikutnya pemerintah ikut serta dalam membantu para umkm dan juga menaikkan taraf ekonomi mereka dengan cara memberikan bantuan langsung dari pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta yang andil dalam membantu para umkm untuk memulihkan dan juga lebih mengembangkan usahanya.

Sebagian besar program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan kepada pelaku usaha mikro. Untuk mendukung dan memberdayakan usaha mikro, pemerintah memberi bantuan berupa pembiayaan atau pemberian modal usaha. Program unggulan pemberian modal yang ada di Indonesia saat ini adalah KUR. Di samping itu, terdapat program-program pembiayaan lain dalam skala yang lebih kecil, seperti bantuan permodalan usaha melalui BUMDes, KUPS, dan KUBE, PKK, dan PKWU.

Berbagai skema pembiayaan UMKM telah dirancang dan disalurkan melalui perbankan maupun non-perbankan. Namun, program tersebut dianggap masih belum terealisasi dengan baik dan tidak mencapai sasaran. Per 2019, hanya sekitar 20 persen dari alokasi anggaran pembiayaan UMKM (setara dengan Rp11

triliun) yang tersalurkan ke UMKM, termasuk realisasi program KUR. Literatur menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro enggan mengakses permodalan yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan.



Gambar 1.2

Daftar stimulus UMKM 2020

(Sumber www.hukumonline.com)

Namun di sisi lain, ada beberapa kendala yang sering kali memperlama proses pencairan dana misalnya, data yang diberikan belum valid, sehingga harus dikembalikan dan membuat proses lebih lama. Kendati begitu, ia menjamin bila calon penerima sesuai kriteria, kesalahan data seperti NIK dan nomor telepon tak akan membuat calon penerima gugur. Kendala lain, yakni bank perlu melakukan waktu pencairan yang dilakukan secara fisik dengan memanggil calon penerima ke kantor. Pencairan tidak diberikan secara transfer langsung karena ada proses tanda tangan perjanjian pemberian dana. Sementara, untuk calon penerima yang tidak memenuhi syarat, biasanya karena pertama, calon penerima diusulkan secara ganda oleh beberapa lembaga. Jadi, misalnya sudah diusulkan dinas, tapi dia sebenarnya nasabah mikro BRI, terus bank usulkan dia juga, jadi ganda kan. Nah ini tidak bisa dua begini, harus dari salah satu saja.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada keengganan tersebut adalah bahwa mayoritas UMKM menggunakan usahanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. Berbagai laporan menyebutkan bahwa UMKM, terutama skala mikro dan kecil, yang memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar naik kelas masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya serapan penyaluran kredit serta penggunaan kredit untuk tambahan modal atau konsumsi rumah tangga,

dan bukan untuk investasi pengembangan usaha. Strategi pemberian modal usaha bagi usaha mikro diharapkan dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan, pada akhirnya, membawa usahanya naik kelas. Namun, strategi tersebut perlu ditinjau secara berkala karena setidaknya terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, literatur dan statistik industri menunjukkan sebagian besar usaha mikro tidak tertarik pada fasilitas program kredit perbankan. Kedua, masih banyak pelaku usaha mikro yang enggan mengakses permodalan, baik melalui layanan perbankan maupun non-perbankan. Ketidak tertarikan pelaku usaha terhadap permodalan usaha merefleksikan keengganan mereka untuk mengembangkan usahanya atau dalam terminologi khusus disebut juga keengganan untuk naik kelas. Meski banyak cendekia yang membuat growth stage model untuk bisnis dengan skala usaha kecil ke besar tidak semua pelaku usaha mengikuti fase pertumbuhan bisnis yang demikian karena proses pertumbuhan unit usaha dari skala kecil ke lebih besar dinilai kompleks.

Karakteristik UMKM yang enggan bertumbuh tersebut tercermin dari perkembangan UMKM di Indonesia. Tujuan pengembangan UMKM agar “naik kelas” masih belum tercapai, yang terlihat dari sangat kecilnya kontribusi usaha besar dalam perekonomian. Program pembiayaan UMKM dari pemerintah hanya mampu menjangkau sebagian kecil UMKM yang kemudian terus berulang menjadi penerima manfaat program. Dengan kata lain, program yang sama cenderung diakses oleh UMKM debitur yang sama berulang kali. Hal ini memengaruhi lambatnya upaya pemerintah untuk meningkatkan skala UMKM secara luas.



Gambar 1.3

Antrian warga yang mengambil BLT UMKM

(Sumber www.cnbcindonesia.com)

NIK	NAMA	ALAMAT	NOMBOR	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
312001	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010001	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312002	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010002	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312003	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010003	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312004	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010004	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312005	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010005	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312006	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010006	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312007	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010007	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312008	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010008	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312009	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010009	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM
312010	DEWANTI, DEWI	KULON, RT 01 RW 02	0812010010	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM

Gambar 1.4

Daftar nama penerima bapres UMKM

(Sumber https://youtube.com/@Azzahra_Media)

Dari gambar diatas bisa dilihat nama nama pedagang yang menerima bantuan tersebut dan untuk lebih lengkapnya bisa juga di cek di cekbanpres.kemensos.go.id. Tidak semua UMKM yang ada di celancang mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap teknologi yang akhirnya menyebabkan nama mereka tidak mendaftarkan dalam banpres tersebut.

Akses UMKM ke pembiayaan yang masih rendah tersebut juga terkait dengan hambatan pengembangan usaha lainnya. Akses ke perizinan, terutama untuk membuka usaha dan meningkatkan mutu produk, termasuk pemasaran dan distribusi produk, merupakan masalah lain yang menghambat pengembangan UMKM di Indonesia. Pengembangan UMKM memerlukan kebijakan yang memiliki sasaran di setiap proses dari hulu ke hilir. Namun hal tersebut memerlukan sumber daya besar karena jumlah usaha mikro dan kecil sangat besar.

Adapun hasil dari peran pemerintah dari usahanya untuk menaikkan taraf ekonomi terutama bagi umkm cukup berhasil. Namun tidak semua pelaku umkm dapat mengembangkan usahanya ada juga yang justru tidak ada perkembangannya dalam usahanya. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis Dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini Disebabkan UMKM mampu membuat perluasan Kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Selain Itu juga keberadaan UMKM menjadi bagian Pembentukan Produk Domestik Brutto (PDB) serta Sebagai penyediaan jaring pengaman terutama bagi Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah untuk Menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Berbagai permasalahan yang terjadi pada UMKM terdampak pandemi cukup dirasakan oleh Para pelaku usaha tersebut. Hal ini tentu saja Berakibat pada penurunan keuntungan secara Signifikan dikarenakan tingkat produktivitas yang

Rendah. Secara garis besar masalah yang dihadapi Oleh UMKM meliputi masalah non keuangan dan Keuangan.

Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan modal yang tidak sedikit oleh karena itu peluang ini ditangkap oleh bank syariah melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana yang paling besar dari lembaga keuangan bank yang penuh dengan risiko kerugian yang cukup besar (Afkar, 2017), namun juga memiliki peluang yang besar dalam mendapatkan laba. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah sejak 2010 hingga 2011 mengalami peningkatan di sektor ekonomi. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari Pembiayaan konsumsi, investasi, dan modal kerja yang berpedoman Pada prinsip syariah dengan skema bagi hasil, maupun skema kemitraan.

Salah satu fenomena yang terjadi ialah para pedagang yang mendapat dana bantuan pembiayaan tersebut justru tidak menggunakan untuk mengembangkan usahanya namun digunakan untuk membeli benda-benda pribadi yang tidak ada hubungannya dengan usahanya tersebut. Lalu ada juga yang menggunakan dana tersebut untuk usahanya namun untuk pendapatannya tidak bertambah dan terkesan tidak ada kenaikan walaupun sudah mendapatkan tambahan modal yang lebih. Alasan membeli benda-benda tersebut dengan menggunakan uang yang harusnya untuk usahanya ialah karena ingin memenuhi hasrat pribadi yang ingin membeli ini itu dengan mudah. Bagi yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk usahanya malah hanya di situ-situ dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang *Financial Behaviour* yang bisa dilihat dari tidak adanya pencatatan keuangan, manajemen keuangan yang baik dan lain sebagainya. Adanya fenomena tersebut menjadi masalah bagi UMKM yang kurang disadari oleh pelaku usaha tersebut yang disebabkan oleh masih rendahnya literasi keuangan mereka, di mana salah satu dampak yang dapat dicermati adalah dalam hal ketidakhahaman mereka atas kredit yang mereka terima.

Hal lainnya dapat dicermati dengan ditandainya pemikiran mudah merasa puas dengan kinerja yang ada. Mereka belum berpikir untuk melakukan peningkatan kemampuan dibidang *Financial Behaviour* karena merasa kinerjanya sudah cukup baik dan usahanya tetap berjalan tanpa kendala meskipun pelaku UMKM tidak membuat perencanaan anggaran dan pengendalian terhadap keuangan.

Turunnya pendapatan UMKM lantaran keterbatasan mobilitas sosial maupun kurangnya pemahaman para pedagang terhadap perilaku keuangan. Alhasil, penjualan produk sektor usaha tulang punggung perekonomian nasional tersebut menurun tajam akibat lesuhnya permintaan. Kesulitan ekonomi ini diperburuk oleh akses terbatas ke produk dan layanan keuangan, ditambah jaring pengaman keuangan yang tidak memadai telah meningkatkan kemungkinan populasi ini jatuh lebih jauh ke dalam kemiskinan.

Beruntung, pemerintah mengambil langkah pencegahan secara cepat untuk mengurangi dampak pandemi pada pelaku UMKM hingga sektor rumah tangga melalui berbagai program bantuan perlindungan sosial hingga insentif bagi dunia usaha. (www.merdeka.com, diakses pada Selasa, pukul 12:44 WIB) Permasalahan yang terjadi adalah penyaluran dana Dengan skema pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Maupun skema pembiayaan syariah lainnya memiliki risiko tidak tertagihnya Pembiayaan tersebut sehingga dapat berdampak pada kemampuan bank dalam Memenuhi kebutuhan modal. Kecukupan modal yang mengalami penurunan akan Berakibat pada kemampuannya untuk mengantisipasi kerugian yang diterima oleh Bank syariah. Penyaluran pembiayaan dengan berbagai skema syariah oleh Perbankan syariah tentunya memiliki risiko yang cukup besar.

Hasil penelitian (Afkar, 2017) menunjukkan bahwa kecukupan modal bank syariah yang diukur Dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dipengaruhi oleh kredit macet yang diukur dari *Non Performing Financing* (NPF), dan pada akhirnya akan berpengaruh pada Penghapusan kredit macet sehingga biaya operasional menjadi semakin tidak Efisien (Afkar, 2017). Pengelolaan transaksi keuangan harus dilakukan secara seimbang yaitu antara aset dan liabilitas agar dapat menghasilkan laba yang optimal. Pemerintah dan pihak-pihak terkait sebenarnya telah memberi bantuan pemberian dana melalui desa yang bersangkutan namun kenyataannya tidak semua orang bisa mendapatkan dana bantuan tersebut, lalu ada juga program dari pemerintah tentang literasi tentang *Financial Behaviour* untuk para pelaku UMKM namun belum terealisasi di pasar celancang sehingga hal ini menyebabkan pedagang yang khususnya ada dipasar celancang ialah beberapa pedagang kurang memahami pentingnya pemahaman tentang *Financial Behaviour* dan juga kurang mengoptimalkan segala bentuk bantuan pembiayaan terhadap usahanya. Dilihat dari usahanya yang kurang berkembang walaupun modal sudah bertambah namun omsetnya hanya segitu-segitu saja dan dan juga yang malah menurun. Lalu ada juga yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan pribadi dan juga hal yang kurang begitu penting.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Pengaruh Pembiayaan dan *Financial Behaviour* pada pedagang yang ada di pasar Celancang sehingga dari bantuan pembiayaan dan pengetahuan tentang *Financial Behaviour* tersebut dapat diketahui pengaruhnya terhadap omset para pedagang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“PENGARUH PEMBIAYAAN DAN FINANCIAL BEHAVIOUR TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG (STUDI PADA PASAR CELANCANG DESA PURWAWINANGUN)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas dapat di identifikasikan masalah terkait pembiayaan dan *Financial Behaviour* terhadap para pedagang yang ada di pasar celancang, sebagai berikut :

1. Berbagai skema pembiayaan UMKM telah dirancang dan disalurkan melalui perbankan maupun non-perbankan. Namun, program tersebut dianggap masih belum terealisasi dengan baik dan tidak mencapai sasaran.
2. Masih ada pedagang pemanfaatan bantuan pembiayaan bagi para pedagang yang kurang maksimal dikarenakan pemakaiannya yang kurang efektif dilihat dari pendapatan mereka yang tidak ada kenaikan.
3. Masih ada pedagang yang kurang akan pemahaman tentang pengendalian *Financial Behaviour* dilihat dari tidak menyiapkan dana tak terduga untuk kebutuhan yang mendesak dan alhasil dia meminta bantuan dana dari pihak lain
4. Masih ada pedagang pengolahan keuangan yang masih kurang baik sehingga menjadi kurang optimal dalam penjualannya contohnya seperti tidak mencatat pemasukan dan juga pengeluaran dalam usahanya. Dari beberapa pedagang ada sebagian kecil yang tidak ada pencatatan keuangannya.
5. Masih ada pedagang bantuan yang didapatkan tidak digunakan untuk mengembangkan usahanya yang malahan digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi itu ialah pakaian, sandal dan ada juga yang digunakan untuk membeli mobil pribadi yang bahkan mobil itu tidak

digunakan untuk kebutuhan usahanya namun untuk kebutuhan keluarga seperti jalan-jalan.

6. Masih ada pedagang usahanya tidak berkembang walaupun telah mendapat bantuan keuangan dilihat dari pendapatannya yang tidak ada kenaikan. Dilihat dari hasil penjualannya yang rata-rata seperti itu dan ada juga yang lebih namun hanya sedikit dibandingkan pendapatan sebelum mendapatkan bantuan.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan dan juga *Financial Behaviour* terhadap para pedagang, diantaranya yaitu pengaruh pembiayaan dan *Financial Behaviour* terhadap perkembangan usaha pedagang yang ada di Pasar Celancang

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang membahas mengenai pembiayaan dan *Financial Behaviour* pada para pedagang yang ada di pasar celancang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- A. Apakah bantuan pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha para pedagang?
- B. Apakah *Financial Behaviour* berpengaruh terhadap perkembangan usaha para pedagang?
- C. Apakah bantuan pembiayaan dan *Financial Behaviour* dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha para pedagang?

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha para pedagang?

2. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *Financial Behaviour* terhadap perkembangan usaha para pedagang?
3. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pembiayaan dan *Financial Behaviour* terhadap perkembangan usaha para pedagang?

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh pembiayaan dan *Financial Behaviour* terhadap perkembangan usaha pedagang

b. Bagi Keilmuan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian serupa serta dapat menjadi perbandingan untuk penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dan pengetahuan tambahan dalam bidang *financial behaviour* (perilaku keuangan) bagi para pedagang

c. Bagi Praktisi

Adanya penelitian diharapkan dapat membantu para pedagang khususnya yang ada di daerah pasar celancang untuk bisa lebih baik lagi dalam memanfaatkan sumber dana bantuan dan elain itu juga untuk dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian ini. Dibawah ini merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Pembiayaan, *Financial Behaviour* dan Perkembangan Usaha. Pembahasan mengenai Literatur review atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, membahas mengenai bagaimana rencana yang akan peneliti lakukan dalam penelitiannya. Tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian pada bab ini berisi diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dan dideskripsikan.